

ABSTRAK

PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

M. ILHAM IBNU ZAQI

Perizinan berusaha berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Namun, fakta di Kabupaten Tanggamus menunjukkan adanya diskrepansi serius antara regulasi dan implementasi, di mana mayoritas destinasi wisata beroperasi tanpa memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) dan izin yang sah, yang berpotensi menyebabkan degradasi ekologis sebagaimana terjadi di kawasan wisata Way Bekhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perizinan pariwisata sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata yang tidak berizin.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perizinan pariwisata sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan pelaku usaha yang sangat rendah, hanya 7,7% (4 dari 52 destinasi wisata) yang memiliki izin lengkap. Ketidakefektifan ini disebabkan kendala pada struktur hukum, lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya anggaran pengawasan serta budaya hukum, di mana pelaku usaha memandang izin hanya sebagai beban administratif dan gagap teknologi terhadap sistem OSS. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera membentuk "Satgas Percepatan Perizinan" untuk melakukan pendampingan "jemput bola" pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen lingkungan di lokasi wisata, serta menerapkan sanksi administratif secara tegas untuk menjamin kepastian hukum dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Perizinan Pariwisata, Perlindungan Lingkungan, OSS-RBA, Yuridis Empiris.

ABSTRACT

TOURISM LICENSING AS AN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONTROL IN TANGGAMUS REGENCY

By

M. ILHAM IBNU ZAQI

Risk-Based Approach (RBA) business licensing through the Online Single Submission (OSS) system is intended to function as a preventive instrument to mitigate environmental damage caused by tourism activities. However, facts in Tanggamus Regency reveal a serious discrepancy between regulation and implementation, where the majority of tourism destinations operate without possessing environmental documents (AMDAL, UKL-UPL or SPPL) or valid permits, potentially causing ecological degradation as occurred in the Way Bekhak tourism area. This study aims to analyze the implementation of tourism licensing as an instrument of environmental control and to identify obstacles in administrative law enforcement against unlicensed tourism businesses.

This research utilizes an empirical juridical method with statutory and sociological approaches. Data was obtained through library research and field studies via interviews with the Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP), the Tourism Office, the Environmental Office, and tourism business actors in Tanggamus Regency. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative method.

The results indicate that tourism licensing as an instrument of environmental control in Tanggamus Regency has not been effective. This is evidenced by the very low compliance of business actors, with only 7.7% (4 out of 52 tourism destinations) possessing complete permits. This ineffectiveness is attributed to obstacles in the legal structure, weak inter-agency coordination, minimal supervision budgets, and legal culture, wherein business actors view permits merely as administrative burdens and lack technological proficiency regarding the OSS system. This study recommends that the Tanggamus Regency Government immediately establish a "Licensing Acceleration Task Force" to provide proactive assistance (jemput bola) in issuing Business Identification Numbers (NIB) and environmental documents at tourism locations, as well as strictly apply administrative sanctions to ensure legal certainty and environmental sustainability.

Keywords: *Tourism Licensing, Environmental Protection, OSS-RBA, Empirical Juridical.*